

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) OLEH BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) TRIDAYA WARU MANDIRI

A. Implementasi Program PLPBK Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru

1. Implementasi Program PLPBK

Implementasi merupakan tahapan setelah rumusan kebijakan ditetapkan dan pada implementasi tersebut apa yang telah ada dalam sebuah kebijakan diterapkan. Implementasi Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas di Kelurahan Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta merupakan program yang dicanangkan sejak 2010 yang diprakarsai oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tridaya Waru Mandiri. Sesuai dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman, program PLPBK merupakan suatu program penataan lingkungan permukiman yang didasarkan pada partisipatif masyarakat dalam merencanakan lingkungan ke depan. Perencanaan partisipatif merupakan bagian dari kegiatan PLPBK yang fokus pada proses penyusunan rencana pengembangan lingkungan permukiman, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat baik BKM, Pokja-pokja PLPBK, Perangkat Kelurahan, Tim Teknis Pemkot untuk PLPBK, Tim Inti Perencanaan Partisipatif, yang didukung oleh PJOK Kecamatan, TKPKD dan TKPP Kota. Perencanaan partisipatif ini meliputi

perencanaan makro (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang meliputi

perencanaan makro (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang meliputi seluruh kawasan Kelurahan dimana didalamnya akan digali potensi dan visi seoptimal mungkin untuk kemudian dapat dianalisa guna menentukan kawasan prioritas.

Dalam implementasi program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) terdapat 4 tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai oleh persiapan BKM sebagai implementor program, BKM harus memiliki komitmen dalam melaksanakan kegiatan PLPBK. BKM dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan oleh PNPM MP, BKM Tridaya Waru Mandiri dianggap sebagai salah satu BKM yang bersih maka dari itu dipilihlkan BKM Tridaya Waru Mandiri sebagai penanggungjawab implementasi program PLPBK di Kelurahan Karangwaru³. Kemudian diadakan pertemuan antara masyarakat, pokja-pokja, perangkat kelurahan, BKM, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dari pertemuan pertama tersebut BKM memberikan informasi kepada masyarakat melalui RT, RW dan tokoh masyarakat bahwa di Kelurahan Karangwaru ada dilaksanakan Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) yang akan melibatkan masyarakat dalam setiap proses implementasinya, mulai dari persiapan, perencanaan, pembangunan hingga pengawasannya dan yang nantinya masyarakat akan menjadi pemelihara hasil

³ Wawancara dengan Bapak Sugito, B.Sc pada 3 Nov 2014

program tersebut. Seperti yang disampaikan Ketua BKM Tridaya Waru Mandiri Bapak Sugito, B.Sc.

“Dari proses awalnya setelah kita mendapat amanah dari PNPM kami langsung mengumpulkan warga yang diwakili oleh RT RW dan beberapa tokoh masyarakat guna menyampaikan program ini bagaimana dan apa yang harus disiapkan dan dilakukan masyarakat.” (wawancara pada 3 Nov 2014)

Sosialisasi yang dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya, melalui pertemuan dengan RT/RW dan Tokoh masyarakat yang kemudian menyampaikannya kepada masyarakat Kelurahan Karangwaru, melalui pertemuan RT, papan pengumuman di setiap RT dan pemasangan spanduk di beberapa titik di Kelurahan Karangwaru bahwa di Kelurahan Karangwaru akan dilaksanakan program PLPBK. Pada tahap persiapan selain dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Karangwaru juga dilakukan penunjukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif dan pengalangan tokoh-tokoh strategi lokal.

Pada tahap persiapan ini juga masyarakat diberitahu bahwa pada proses selanjutnya yakni tahap perencanaan partisipatif akan melibatkan masyarakat untuk merencanakan pembangunan seperti apa pembangunan yang akan dilakukan nantinya.

2. Tahap Perencanaan Partisipatif

Dalam tahap ini dimulai dengan refleksi perkara kritis yang meliputi refleksi kemiskinan, mitigasi bencana, dan masalah lingkungan. Dalam perencanaan dicantumkan pula bagaimana skenario pengembangan lingkungan dan prospek

pembangunan maupun kemungkinan pembangunan yang dapat dilakukan. Pada tahap ini pula dilakukan perekrutan tenaga ahli guna membantu masyarakat dalam melakukan pemasaran maupun pada proses pembangunannya.

Refleksi kemiskinan, pada saat pengimplementasian program tersebut jumlah KK miskin di Kelurahan Karangwaru mencapai 416 KK per Oktober tahun 2010.

B.1. Potensi Kawasan

1. Sungai Buntung, potensi alam Sungai Buntung bisa dikembangkan untuk kegiatan wisata air, wisata kuliner, dan wisata alam lainnya dengan berbagai tema yang disesuaikan dengan karakter masing-masing kawasan. Potensi pembangunan Sungai Buntung akan semakin meningkat dengan adanya pembangunan Riverside disepanjang sungai yang ditambah lagi dengan penghijauan sepanjang sungai yang berfungsi sebagai konservasi dan estetika.

2. Sungai Code, potensi alam Sungai Code bisa dikembangkan untuk kegiatan wisata air, wisata kuliner dan wisata alam lainnya, dan juga ada prospek yang bagus dalam pengembangan perikanan darat.

3. Potensi ruang publik, Kelurahan Karangwaru yang berada di sekitar jalan Magelang yang memiliki keramaian yang cukup padat bisa menjadi lokasi strategis untuk pengembangan wisata kuliner dan pusat jajanan tradisional.

B.2. Skenario Pengembangan Kawasan

B.2.1 Pengembangan kawasan lindung

Dalam pengembangan kawasan lindung memiliki dua zone, yaitu:

- a. Zone Preservation (Lindung), yakni wilayah khusus yang diperuntukkan untuk kawasan lindung dan penyangga sehingga pemanfaatannya cenderung untuk tanaman keras dan dibiarkan secara alami. dalam zone ini dilakukan penanaman tanaman yang keras/ kuat yang sesuai dengan jenis tanaman yang cocok untuk wilayah sungai. Kawasan yang dipilih ialah kawasan Sungai Buntung dan Sungai Code yang ada di wilayah Kelurahan Karangwaru.
- b. Zone of Conservation, konservasi lingkungan dilakukuan di Sungai Buntung dan Sungai Code yang akan dikembangkan menjadi kawasan wisata alam dan juga pertanian perkotaan di beberapa wilayah di Karangwaru untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata alam, objek pendidikan dan sebagai daerah tangkapan air.

B.2.2. Pengembangan Pusat Lingkungan dan DAS (Daerah Aliran Sungai)

Dalam pengembangan pusat lingkungan dan DAS akan dilakukan dengan beberapa skenario pengembangan, yaitu pengembangan sub-sub pusat lingkungan/ publik area dalam skala RT dan RW dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan kosong. Selanjutnya ialah melalui pengembangan jalur hijau di DAS Sungai Buntung dan Sungai Code dengan menanam pohon yang berfungsi untuk penghijauan kawasan.

Kemudian menetapkan kawasan sepanjang aliran sungai sebagai kawasan Konservasi untuk pengolahan dan perlindungan aliran sungai. Dan skenario pengembangan

selanjutnya dengan mengembangkan pemukiman di sekitar daerah aliran sungai harus memperhatikan secara ketat kelestarian lingkungan, disini lah dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungannya.

Dalam proses perencanaan terdapat kegiatan musyawarah PLPBK yang dilakukan antara Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) PLPBK beranggotakan 15 orang, 2 orang dari Pemerintah Kota, 1 orang dari Pemerintah Kelurahan, BKM Tridaya Waru Mandiri, Karangtaruna, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat). Dari hasil musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan tentang lokasi kawasan prioritas yang dicantumkan dalam Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP).

B.3. Lokasi Kawasan Prioritas

Dalam implementasi program PLPBK kawasan prioritas terbagi dalam 6 segmen, 4 segmen diantaranya merupakan kawasan bantaran Sungai Buntung (segmen 1-4), segmen 5 merupakan penataan open space/ public space dan segmen 6 adalah penataan open space di tepi Sungai Code.

Kawasan prioritas 80% merupakan penataan lingkungan wilayah bantaran Sungai Buntung yang membentang dan mengalir membelah wilayah Kelurahan Karangwaru menjadi dua bagian. Panjang Sungai Buntung \pm 1.415 m dengan lebar rata-rata 2-4 m yang bermuara di Sungai Winongo

Segmen 1, berada di wilayah RW II (RT. 55) dan RW IV (RT. 12) memiliki luas wilayah pengamatan ± 1.50 ha dan panjang sungai 125,97 m.

Segmen 2, berada di wilayah RW II (RT. 5) dan RW V (RT. 13, 14, 16 dan 17) dengan luas wilayah pengamatan ± 4.83 ha dan panjang sungai 350,52 m.

Segmen 3, berada di wilayah RW XIV dan RW VI (RT. 19, 21, 22, dan 24) dengan luas pengamatan ± 3.54 ha dan panjang sungai 424,92 m.

Segmen 4, berada di wilayah RW I (RT. 02, 03, 04) dan RW IV (RT. 10) dan memiliki luas pengamatan ± 5.11 ha dan panjang sungai 520,68 m.

Segmen 5, berada di wilayah RW X (RT. 39) dengan luas perencanaan 21 m^2 (6 x 21).

Segmen 6, berada di wilayah RW VIII (RT 29) dengan luas perencanaan $\pm 2067 \text{ m}^2$.

B.3.1. Pemanfaatan Lahan

a) Segmen 1-4

Pada segmen ini terdapat di kawasan Sungai Buntung dan Sungai Code, pemanfaatan lahan di kawasan prioritas segmen 1-4 sebagian besar digunakan untuk pemukiman hampir 61% dari luas wilayah pengamatan segmen 1-4.

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Industri Besar	1.54	8.8
2	Industri Kecil Rumahan	0.12	0.7
		0.4	0.2

4	Kantor	0.22	1.3
5	Kebun	0.97	5.6
6	Masjid	0.04	0.2
7	Pemukiman	10.66	61.0
8	Perumahan	1.01	5.8
9	Pendidikan	0.80	4.6
10	Toko	0.13	0.7
11	Warung	0.22	1.3
12	Sungai	0.56	3.2
13	Jalan	1.16	6.6
	Total	17.47	100

Tabel 1.2– Pemanfaatan Lahan Segmen 1-4

b) Segmen 5

Pemanfaatan lahan di kawasan prioritas segmen 5 sebagian besar digunakan untuk permukiman hampir 35% dari luas wilayah RW 08 RT 29. Pemanfaatan terkecil untuk ruang terbuka sebesar 0.8% dari luas wilayah.

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	%
1	DAS	0.29	13.6
2	Jalan	0.25	11.9
3	Permukiman	0.73	34.7
4	Perdagangan dan Jasa	0.25	11.9
5	Perkantoran	0.06	2.9
6	Ruang Terbuka	0.02	0.8
7	Sungai	0.10	4.7
8	Tanah Kosong	0.41	19.4
	Total	2.11	100

c) Segmen 6

Pemanfaatan lahan di segmen 6 didominasi oleh pemukiman hampir 71% dari luas pengamatan segmen 6. Peruntukan lahan terkecil dimanfaatkan untuk perdagangan dan jasa sekitar 7% dari luas pengamatan segmen 6.

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Jalan	0.120	9
2	Pemukiman	0.921	71
3	Perdagangan dan Jasa	0.086	7
4	Tanah Kosong	0.166	13
Total		1.293	100

Tabel 1.4– Pemanfaatan Lahan Segmen 6

B.3.2. Karakteristik Segmen 1-6

□ Segmen 1, pada bagian kiri/ barat Sungai Buntung memiliki wilayah administrasi RW 2 yang terdiri dari RT 5C. Bagian sisi kiri dipadati pemukiman penduduk dan terdapat fasilitas perkantoran pemerintah Kelurahan. Kondisi umum jalan lingkungan relatif baik. Untuk jalan lingkungan lebar 3m dan jalan gang 1m. Topografi pada sisi kiri sepanjang sungai sedikit curam. Sebagian tebing sungai sudah di talud/ bronjong namun masih rawan longsor. Kepadatan penduduk cenderung sedang, jumlah penduduk ± 21 KK atau ± 85 jiwa dengan tingkat kemiskinan tergolong rendah. Untuk kepemilikan lahan hampir semua berstatus hak

milik dan ada beberapa yang kontrak. Kondisi sanitasi lingkungan pada segmen 1

Pada bagian kanan Sungai Buntung memiliki wilayah administrasi RW 4 terdiri dari RT 12, memiliki kondisi jalan lingkungan relatif baik dengan lebar jalan 3m dan lebar gang 1m. Topografi pada sisi kiri sepanjang sungai sedikit curam dan sebagian tebing sudah di talud/ bronjong namun masih rawan terjadi bronjong. Memiliki kepadatan penduduk cenderung sedang, dengan jumlah penduduk \pm 31 KK atau \pm 115 jiwa dan memiliki tingkat kemiskinan relatif rendah.

□ Segmen 2, pada bagian kiri Sungai Buntung memiliki wilayah administrasi RW 2 yang terdiri dari sebagian RT 5, wilayah ini memiliki kondisi jalan yang relatif baik dengan lebar jalan 3m dan jalan gang 1m. Topografi pada sisi kiri sepanjang sungai curam terutama dibagian jembatan Kobuta, sebagian tebing disisi kiri sungai belum di talud sehingga rawan terjadi longsor. Infrastruktur terutama sanitasi lingkungan belum tertata, sampah dari lingkungan pemukiman banyak yang dibuang ke sungai sehingga terjadi penumpukan sampah dan terjadi penyempitan di badan sungai. Pada bagian kanan Sungai Buntung memiliki wilayah administrasi RW V yang terdiri dari RT 16, 17, dan 19. Pada sisi kanan sungai agak curam pada bagian utara jembatan dan sebagian besar tebing belum di talud.

□ Segmen 3, bagian kiri Sungai Buntung memiliki wilayah administrasi RW 2 yang terdiri dari RT 49 dan 52. Kondisi jalan diwilayah ini cukup baik dengan lebar jalan 2-3m dan jalan gang 1m. Topografi pada sisi kiri sepanjang sungai agak curam, hampir semua tebing sudah di talud namun badan sungai mengalami penyempitan karena terdesak oleh bangunan. Pada sisi kanan memiliki wilayah administrasi RW V

(RT 19), RW VI (RT 21, 22, dan 24), RW X (RT 35). Topografi diwilayah kanan Sungai Buntung relatif landai, dan sebagian besar tebing sungai sudah ditalud dengan pasangan batu kali.

□ Segmen 4, pada bagian kiri Sungai Buntung memiliki wilayah administrasi RW 1 (RT 02), RW 2 (RT 04). Topografi pada wilayah ini agak curam, hampir semua tebing sudah di talud namun padan sungai mengalami penyempitan karena terdesak oleh bangunan. Sanitasi lingkungan belum tertata karena masih banyak warga yang membuang limbah rumah tangga ke sungai sehingga terjadi penumpukan sampah. Pada bagian kanan Sungai Buntung memiliki wilayah administrasi RW IV (RT 10) dengan topografi pada sisi kanan sungai relatif agak curam dan sebagian besar tebing sungai sudah di talud dengan pemasangan batu kali.

□ Segmen 5, memiliki wilayah administrasi RW VIII RT 29. Topografi diwilayah segmen 5 memiliki kelerengan yang cukup curam. Sebagian pemukiman warga yang berbatasan dengan Sungai Code sebagian di talud dengan batu kali. Sanitasi lingkungan belum tertata, warga masih membuang limbah rumah tangga atau sampah lingkungan ke sungai dan sebagian ada yang dibakar dan ditimbun, sistem jaringan drainase belum terintegrasi satu sama lain sehingga air bersih mengalir di badan jalan.

□ Segmen 6, wilayah prioritas segmen 6 berada di wilayah administrasi RW X RT 28. Kawasan merupakan lahan milik Sultan Ground, kondisi tanah relatif datar

dan merupakan tanah kosong, oleh masyarakat dimanfaatkan untuk berjualan dan parkir kendaraan.

B.4. Analisa Potensi dan Masalah berdasarkan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP)

B.4.1. Analisa Kesesuaian Lahan

Segmen 1-4

Permasalahan yang timbul:

1. Keberadaan flora dan fauna didalam kawasan perencanaan banyak yang sudah mengalami penurunan dalam perkembangbiakan di dalam sungai, dikarenakan tingkat pencemaran yang terjadi.
2. Rawan banjir dan longsor. Rawan banjir , kondisi perencanaan yang merupakan kawasan bantaran sungai memiliki ketinggian permukaan tanah yang cenderung rendah dan menjadi muara bagi saluran drainase wilayah seperti RW 1 dan RW 6. Sedangkan di beberapa wilayah mengalami penyempitan badan sungai karena terdesak oleh pemukiman seperti di RW 10 dan 14 sehingga rawan terhadap genangan air. Rawan longsor, kondisi bantaran Sungai Buntung yang sebagian belum di talud rawan terjadi longsor yaitu di wilayah RW 1, 2 dan 5.
3. Potensi alam kurang bisa dimaksimalkan, sungai sebagai kawasan lindung yang memiliki keindahan alam kurang dimanfaatkan secara maksimal

4. Pada kawasan perencanaan cenderung sudah padat dengan pemukiman dan fungsi-fungsi komersial/jasa.

Analisa kesesuaian lahan:

1. Penyediaan kembali pemanfaatan ruang terbuka hijau dan revitalisasi bantaran sungai sehingga habitat sungai kembali normal.
2. Rawan banjir dan longsor. Rawan banjir, ditanggulangi dengan normalisasi sungai yang mengalami penyempitan dan menata ulang sistem drainase lingkungan dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada. Rawan longsor, penguatan tanggul dan perbaikan tanggul sungai.
3. Penyediaan ruang-ruang rekreatif yang bersifat alami sepanjang sungai yang memiliki area potensial.
4. Kawasan sepanjang sungai merupakan kawasan yang cocok untuk hunian dengan kepadatan penduduk tinggi/ high density (rumah susun, apartemen, condominium dll) mengingat terbatasnya lahan dan besarnya jumlah penduduk yang bermukim dikawasan tersebut. Sedangkan di area-area yang relatif belum terbangun (sekitar RW 5 RT 13,14,16,17 cocok untuk pemukiman berkepadatan rendah atau area resettlement pada pemukiman tepi sungai yang direncanakan sebagai area hijau maupun komersial

Permasalahan timbul diantaranya:

2. Rawan banjir dan longsor. Rawan banjir, wilayah sungai yang menjadi muara drainase dan juga curah hujan tinggi seringkali menyebabkan genangan di wilayah segmen 5. Rawan longsor, kondisi wilayah yang memiliki lereng kurang stabil menjadi penyebab longsor.
3. Potensi alam yang kurang bisa dimaksimalkan.
4. Banyaknya lahan kosong yang belum dimaksimalkan.

Analisis kesesuaian lahan:

4. Pemanfaatan ruang-ruang terbuka dan revitalisasi bantaran sungai.
5. Normalisasi badan sungai dan penguatan tanggul untuk mencegah terjadinya longsor.
6. Penyediaan ruang-ruang rekreatif yang bersifat alami sepanjang sungai yang memiliki area potensial.

Segmen 6

Permasalahan yang timbul diantaranya:

1. Kawasan perencanaan berada di pemukiman warga dan status tanahnya merupakan Sultan Ground.
2. Lahan sangat terbatas sehingga pengembangannya kurang maksimal.

Analisis kesesuaian lahan:

1. Melibatkan elemen masyarakat di lingkungan sekitar dalam proses perencanaan sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan masyarakat. Status tanah memudahkan dalam proses perencanaan.
2. Perencanaan kawasan dengan konsep minimalis sehingga menekankan pada fungsinya.

B.4.2. Analisa Pemukiman dan Pertanian

Permasalahan yang terdapat di kawasan pemukiman di sepanjang bantaran Sungai Buntung, antara lain:

- a. Status kepemilikan tanah yang belum bersertifikat/ belum tercatat di BPN sehingga keberadaan pemukiman secara hukum masih lemah.
- b. Secara penggunaan lahan/ tata guna lahan (land use), belum ada aturan/ regulasi mengenai kawasan sepadan sungai yang memberi jarak minimal peruntukan pemukiman yang diijinkan di sepanjang bantaran sungai.
- c. Kondisi lingkungan yang tumbuh secara sporadis/ sprawl, yang cenderung menjadi lingkungan kumuh sangat besar. Tidak jelasnya status hukum membuat pelayanan akan sarana dan prasarana dasar belum bisa melayani secara baik/ keseluruhan.
- d. Menimbulkan ancaman/ pencemaran lingkungan alam sekitar maupun pada penghuni kawasan tersebut (keehatan, keselamatan, kenyamanan)

- e. Kondisi rumah yang cenderung non permanen/ semi permanen menambah kesan kumuh yang sudah diciptakan skibat pola lingkungan yang ada, dan anggapan bahwa sungai sebagai area belakang.

Potensi yang bisa dikembangkan dalam penataan kawasan permukiman bantaran sungai, antarlain:

- a. Nilai ekonomi/ nilai strategis lokasi yang relatif dekat atau menjadi bagian dari pusat kegiatan ekonomi kota menjadikan kawasan perencanaan sebagai pengembangan yang sangat penting untuk dikembangkan sebagai Riverside.
- b. Aspek pertanahan yang cenderung masih belum bersertifikat memudahkan pihak pemerintah secara hukum dalam pembebasan lahan dalam rangka penataan kawasan maupun pembuatan infrastruktur (jalan, tanggul, fasilitas umum dan sosial).
- c. Aspek tata guna lahan di sekitar bantaran dengan adanya kawasan sepadan sungai ini juga akan memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah kota dalam penataan kawasan menjadi kawasan yang lebih sesuai dengan fungsi lahan.

B.4.3. Analisa Kondisi Sosial dan Budaya

Nilai sosial budayayang berkembang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh faktor positif maupun negatif. Faktor positif dimana semangat

kebersamaan, kemajuan untuk berkembang dan budaya gotong royong masih tertanam. Faktor negatif, ada beberapa masyarakat yang secara sengaja atau tidak sengaja memanfaatkan ruang dan fasilitas kota menjadi daerah hunian dan sumber ekonomi mereka.

Beberapa permasalahan terhadap kondisi sosial budaya:

- a. Masih adanya perilaku masyarakat yang menggunakan sungai untuk MCK
- b. Secara sosial masyarakat hanya peduli pada lingkungan/ wilayahnya sendiri.
- c. Budaya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Analisa:

- a. Penyediaan ruang-ruang publik sebagai sarana interaksi antara individu atau kelompok lingkungan
- b. Pengalihan budaya-budaya lokal yang berkembang di setiap wilayah sehingga bisa menjadi suatu aset wisata

B.4.4. Analisa Kondisi Sanitasi, MCK, IPAL, dan Septic Tank

Permasalahan:

- b. Pembuangan limbah domestik rumah tangga langsung tanpa pengolahan

- c. Belum terintegrasinya sistem drainase lingkungan sehingga sering terjadi genangan air hujan. Dan air hujan langsung menuju ke bantaran sungai secara merata tidak terpusat.
- d. Masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan sungai untuk MCK.
- e. Sistem sanitasi lingkungan belum ada, sehingga kualitas lingkungan dan sumber air bersih terganggu.
- f. Di permukiman padat penduduk pembuatan septi tank kurang terpantau sehingga kurang memiliki kesehatan lingkungan.

Analisa:

- a. Perlu adanya pengolahan limbah rumah tangga secara komunal sehingga limbah diolah terlebih dahulu sebelum di buang ke sungai.
- b. Pembuatan sistem drainase yang menyatu dengan jalan lingkungan yang disesuaikan dengan topografi wilayah sehingga sistem drainase akan tersentral dan terintegrasi.

Dalam perencanaan partisipatif implementasi program PLPBK, berdasarkan hasil rembung warga disepakati kawasan prioritas terbagi dalam 6 segmen, 4 segmen diantaranya merupakan kawasan bantaran Sungai Buntung (segmen 1-4), segmen 5 merupakan penataan open space/ public space dan segmen 6 adalah penataan open space di tepi Sungai Code. Kawasan prioritas 80% merupakan penataan lingkungan wilayah bantaran Sungai Buntung yang membentang dan mengalir membelah

wilayah Kelurahan Karangwaru menjadi dua bagian. Panjang Sungai Buntung ± 1.415 m dengan lebar rata-rata 2-4 m yang bermuara di Sungai Winongo.

Sesuai dengan perencanaan pengembangan kawasan segmen 1 hingga segmen 6, diatur pula tentang perencanaan pembangunan di segmen 1,2,3 dan 4 yang melintasi kawasan sungai Buntung, perencanaan yang disepakati diantaranya: 1) Membentuk jaringan jalan untuk pedestrian di area pengembangan. Pembangunan jalan baru bertujuan untuk dapat membuka wilayah perencanaan dengan wilayah lain disekitarnya. 2) Membentuk jaringan pedestrian way yang menghubungkan semua unit perencanaan sehingga tercipta pedestrian freedom/ jalur bebas. 3) Mengupayakan agar sepadan bangunan bisa menjadi urban green space. 4) menetapkan jarak bangunan terhadap jalan sedemikian rupa sehingga tercipta *building alignment* yang serasi. 5) mengarahkan ketinggian bangunan, sehingga akan menghasilkan *roof-line* yang berirama dan menghasilkan koridor jalan sebagai ruang *closure*. 6) untuk memperkuat pintu masuk pada kawasan dapat dibuat gerbang sebagai *focal point* untuk kawasan melalui pengarahannya ketinggian bangunan di sisi kiri-kanan jalan, sehingga bisa membentuk image sebagai gerbang. 7) Memberikan link antara bangunan berupa pedestrian shelter/ koridor bagi pejalan kaki, sehingga wilayah perencanaan bisa disebut sebagai kawasan *pedestrian friendly*.

Pada tahap perencanaan ini juga dilakukan perekrutan Tenaga Ahli Perencanaan dan Pemasaran dilakukan langsung oleh BKM Tridaya Waru Mandiri melalui berbagai seleksi. dari proses seleksi tersebut dipilihlah bapak Ihsan sebagai TAPP

program PLPBK Kelurahan Karangwaru yang akan bertanggung jawab atas pemasaran program.

3. Tahap Pemasaran Kawasan Prioritas

Tahap pemasaran kawasan prioritas dalam program Pentaan Lingkungan Berbasis Komunitas, merupakan tahap untuk mencari investor. Pemasaran disini berarti menjual program yang di tawarkan oleh BKM Tridaya Waru Mandiri kepada Ditjen Cipta Karya, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan tujuan mendapatkan dana dari APBD maupun APBN guna melakukan pembangunan di segmen-segmen yang sudah direncanakan oleh masyarakat. Dalam tahap ini juga dilakukan oleh masyarakat langsung yakni masyarakat membentuk tim pemasaran yang di dampingi oleh TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran). Pemasaran dilakukan dengan pembuatan proposal oleh masyarakat Karangwaru bersama KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), Pemerintah Desa, BKM, TIPP dan di koordinir oleh TAPP. Dari pemasaran program tersebut nantinya dana yang didapat akan digunakan untuk pembangunan segmen-segmen lain diluar segmen yang menggunakan dana BLM, karena dalam program PLPBK BLM hanya diberikan satu kali sehingga masyarakat harus berusaha dan bekerjasama dengan pemerintah untuk bisa mendapatkan dana guna membangun wilayah yang sudah direncanakan.

Pada tahun 2012, pemerintah Kelurahan Karangwaru bersama BKM dan masyarakat sepakat untuk melakukan presentasi pemasaran dengan tujuan pencairan

dana APBN untuk pembangunan segmen 2-6. Atas inisiatif warga dan BKM juga dukungan pemerintah Karangwaru menuju DPR RI untuk memperpresentasikan program PLPBK beserta dana yang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan Lurah Karangwaru

“Kita ke DPR RI dengan tujuan mendapat aliran dana dari APBN untuk melanjutkan program PLPBK, kita presentasi di depan anggota DPR RI memasarkan program di Karangwaru, namun sampai saat ini belum ada kepastian. Tapi karena inisiatif warga itu sekarang Karangwaru Riverside jadi banyak diketahui orang hingga ke mancanegara”. (wawancara pada 14 Nov 2014)

Pemasaran program PLPBK terus dilakukan oleh BKM Tridaya Waru Mandiri, pemerintah Kelurahan Karangwaru maupun warga Karangwaru. Pemasaran tidak hanya dilakukan dengan presentasi kepada DPR RI namun juga dengan channeling dengan mengajukan proposal, proposal ini dibuat dalam proses penawaran program kerjasama antara Pihak I yakni BKM sebagai pemohon terhadap Pihak II termohon atau calon mitra. Proposal mencakup gambaran umum dan rincian program terhadap point-point penawaran, rencana kerja sekaligus mekanisme, jangka waktu pelaksanaan dan organisasi / administrasi pelaksanaan program.

Dari channeling ini, pada tahun 2013 BKM Tridaya Waru Mandiri mendapat kepercayaan dari Ditjen Cinta Karang Provinsi DIY dengan mendapatkan dana sebesar

Rp.700.000.000,-. Dana tersebut merupakan dana kemitraan, pada awalnya dana tersebut oleh pemerintah Provinsi DIY akan dialokasikan untuk pembangunan berbasis swadaya di luar Kota Yogyakarta namun karena lokasi dan warga tujuan belum siap maka dana tersebut dialihkan untuk pembangunan di Karangwaru, melihat dari kesiapan warga dan organisasi pengelolanya maka dana tersebut digunakan untuk pembangunan segmen 4, pemilihan segmen 4 sendiri karena segmen 4 merupakan hulu dari segmen 1,2,dan 3 sehingga dipilihlah pembangunan di segmen 4.

4. Tahap Pembangunan

Tahap terakhir ialah tahap pembangunan, tahap pembangunan dilakukan setelah adanya kesepakatan oleh masyarakat Karangwaru terhadap kawasan prioritas. Karena dana yang diperoleh hanya terbatas maka pembangunan dilakukan dengan menggunakan kawasan prioritas, berdasarkan hasil keputusan dalam rembuk warga bersama TIPP dari 6 segmen yang ada di Kelurahan Karangwaru diperoleh hasil bahwa segmen 1 menjadi lokasi yang akan dilakukan pembangunan dengan menggunakan dana BLM. Segmen 1 menjadi lokasi pertama pembangunan karena pertimbangan beberapa hal:

1. Merupakan kawasan yang lebih dekat dengan hulu sungai yang berada di perbatasan dengan wilayah Kabupaten Sleman.

2. Dengan pembangunan segmen 1 akan memperlancaran aliran sungai ke segmen 2, dan 3.
3. Berdasarkan perhitungan dana, dana tersebut cukup untuk pembangunan segmen 1.
4. Rumah warga yang berbatasan langsung dengan sungai.

Penataan Kawasan Prioritas Segemen 1

Pembangunan segmen 1 dilakukan dengan nilai-nilai berikut:

- a. Ekologi, nilai ekologi terkait dengan upaya melestarikan lingkungan (DAS) Sungai Buntung, kelestarian ekologi Sungai Buntung menjadi salah satu tolok ukur keunikan hubungan masyarakat dengan sungai, yaitu bagaimana hubungan batin masyarakat terhadap sungai dan menjadi fondasi kelestarian dan kualitas lingkungan. Kegiatan pembangunan:
 - 1) Menata tanaman pepohonan di sepanjang sisi kiri dan kanan sungai
 - 2) Menambah tanaman pepohonan agar lingkungan semakin hijau dan tertata rapi
 - 3) Menata, merapikan elemen-elemen hijau lingkungan menjadi elemen estetika lingkungan sekaligus elemen biologi lingkungan.

Salah satu model untuk melestarikan Sungai Buntung dari sudut pandang ekologis adalah menerapkan penataan fisik berbasis konsep GREEN ARCHITECTURE.

- b. Edukasi, nilai edukasi terkait dengan memanfaatkan sungai sebagai sarana pendidikan lingkungan bagi anak-anak sejak usia dini. Nilai edukasi juga

diarahkan kepada fungsi ruang Sungai Buntung yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perolehan informasi pengetahuan bagi warga yang memanfaatkannya. Kegiatan belajar memahami lingkungan dan aktivitas bertukar informasi pengetahuan di ruang Sungai Buntung menjadi tolok ukur keberhasilannya. Tindakan pembangunan:

- 1) Memberi nama pada tanaman yang ada di area sungai
- 2) Menanam tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (tanaman herbal)
- 3) Menata letak pohon dengan mempertimbangkan karakternya secara biologi, fungsi dan estetikanya
- 4) Menciptakan sarana dan prasarana untuk belajar atau memperoleh informasi di area Sungai Buntung

c. Teknologi, nilai teknologi terkait dengan usaha memanfaatkan sungai dan ruang sungai sebagai tempat pembanglit atau penerapan teknologi ramah lingkungan. Tolok ukur keberhasilannya adalah munculnya pemanfaatan sungai sebagai tempat ujicoba atau penerapan teknologi ramah lingkungan. Tindakan pembangunan:

- 1) Membuat penerangan buatan di area penataan dengan menggunakan energi matahari
- 2) Menata pembuangan limbah rumah tangga menjadi lebih terkoordinasi untuk menghasilkan energi ramah lingkungan

3) Memasang penerangan lingkungan dengan memanfaatkan energi listrik dari

d. **Kebudayaan, nilai kebudayaan terkait dengan upaya membangun perilaku hidup bersama yang guyub rukun dan bermartabat. Tolok ukur keberhasilannya adalah area penataan berkembang semakin menarik menjadi ruang publik yang aktif-dinamis bagi kegiatan-kegiatan interaksi warga. Tindakan pembangunan:**

- 1) **Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kebudayaan sesuai dengan upaya menghidupkan sungai sebagai tempat rekreasi**
- 2) **Merancang agenda kebudayaan yang bersifat rutin**
- 3) **Menata Sungai Buntung dengan mengikuti skenario kegiataa-kegiatan kebudayaan yang direncanakan**
- 4) **Menintegrasikan kegiatan kebudayaan dalam proses pembangunan bertahap**

Pembangunan secara fisik pada segmen 1 di mulai dengan pembersihan Sungai butung dari pohon bambu yang menutupi aliran sungai, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan jalan inspeksi, jalan inspeksi difokuskan untuk pejalan kaki yang melintasi kawasan Sungai Buntung. Jalan inspeksi berukuran 1,5 m dengan alokasi 1,2 m untuk sarana penajaln kaki dan 0,3 m untuk lokasi tanaman dan jalan inspeksi bawah berukuran 1 m, jalan inspeksi tersebut merupakan tanah warga yang secara sukarela digunakan sebagai jalan dan pengalihan rumah warga yang sekarang menjadikan sungai sebagai halaman depan rumah mereka. Selain pembangunan jalan inspeksi juga dibangun ruang publik yakin pendopo yang berada di sisi sungai dan

ruang bermain anak dengan fasilitas bermainnya. Pada jalan masuk yang berada di

sisi utara dan selatan sungai dibangun tempat duduk. Pada sisi kanan dan kiri jalan di bangun penerangan jalan yang berada diantara tanaman herbal.

Selain dana BLM yang digunakan untuk pembangunan segmen 1, Karangwaru juga mendapatkan dana kemitraan dari Ditjen Cipta Karya Provinsi DI Yogyakarta yang kemudian digunakan untuk pembangunan di segmen 4.

“Di segmen 4 merupakan dana dari kemitraan, sebenarnya dana tersebut untuk daerah lain, namun karena daerah tujuan belum siap maka dialihkan ke Karangwaru dan kami bersama warga sepakat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan segmen 4.” (wawancara dengan Ketua BKM Bapak Sugito, B.Sc pada 3 Nov 2014)

Segmen	Program	Kegiatan	Keterangan
1	Lingkungan		Masyarakat mengerjakan
	a. Revitalisasi sungai	1. Penguatan talud bronjong dengan kolom penyangga dan ring 2. Perbaiki tebing sungai/ pembuatan talud sisi barat dan timur sungai	sendiri pembangunan dimulai dari pembersihan kawasan sungai, pembuatan talud, dan pembangunan tebing sungai yang dibantu beberapa tukang bangunan.
	b. Jalan	Pembangunan jalan inspeksi tepi sungai dengan lebar 1,5m pada sisi barat dan timur sungai	Masing-masing rumah warga yang berada di pinggir sungai Buntung menjadikan 1,5m tanah mereka sebagai jalan inspeksi. Masyarakat Karangwaru melakukan pengukuran dan pembangunan jalan inspeksi.
	c. Drainase	Pembangunan drainase sepanjang jalan inspeksi di sisi barat dan timur sungai	Pembangunan drainase dilakukan oleh tenaga ahli bersama masyarakat.
	d. Ruang terbuka	Pembuatan open space/ruang terbuka	Secara bertahap setelah pembangunan di pinggir

	<p>e. Vegetasi</p> <p>f. Listrik</p> <p>g. Bak sampah Bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka sisi barat 19 x 8 - Ruang terbuka sisi barat 9 x 6,5 - Ruang terbuka sisi timur 8 x 1,90 a. Penanaman pohon palem raja tinggi 4m di jalur pedestrian di sisi barat dan timur sungai b. Penanaman rumput gajah/ jepang di sisi barat dan timur sungai Pemasangan lampu pedestrian dan lampu taman di sisi barat dan timur sungai Tempat sampah fiber glass a. Pembuatan pergola di sisi barat dan timur sungai b. Pembuatan gazebo c. Pembuatan pintu gerbang d. Pembuatan septiktank komunal limbah domestik e. Pemasangan pipa induk sal limbah komunal dengan beton d: 30 di pemukiman barat sungai/ RT 55a 	<p>sungai dilakukan kemudian dilakukan pembersihan lahan sebagai ruang terbuka dan juga pembuatan tempat berkumpul warga (gazebo, tempat bermain anak). Dari semua program dan kegiatan yang ada dalam perencanaan pembangunan segmen 1 semua dapat dilaksanakan oleh warga Kelurahan Karangwaru bersama BKM.</p>
2	<p>Lingkungan</p> <p>a. Revitalisasi sungai</p> <p>b. Jalan</p> <p>c. Drainase</p>	<p>Perbaikan tebing sungai/ pembuatan talud di sisi barat sungai</p> <p>Pembangunan jalan inspeksi tepi sungai dengan lebar 1,5m di sisi barat dan timur</p> <p>Pembangunan drainase</p>	<p>Pada segmen 2 belum dilakukan pembangunan karena belum adanya dana</p>

	<p>d. Vegetasi</p> <p>e. Listrik</p> <p>f. Bak sampah</p> <p>Bangunan</p>	<p>sepanjang jalan inspeksi sisi barat dan timur sungai</p> <p>a. Penanaman pohon palem raja tinggi 4m dijalur pedestarian sisi barat dan timur sungai</p> <p>b. Penanaman rumput gajah/ jepang di sisi barat dan timur sungai</p> <p>Pemasangan lampu pedestrian dan lampu taman di sisi barat dan timur sungai</p> <p>Bahan bsei galvanis dan tempat sampah viber glass</p> <p>a. Pembuatan pergola sisi barat dan timur sungai</p> <p>b. Pembuatan pintu gerbang</p> <p>c. Pembuatan kolam ikan (6x10= 60 m²)</p> <p>d. Pembuatan kandang itik (8x15= 120 m²)</p> <p>e. Tempat usaha warga (6x12= 72 m²)</p>	
3	<p>Lingkungan</p> <p>a. Jalan</p> <p>b. Drainase</p> <p>c. Joging track</p> <p>d. Vegetasi</p> <p>e. Listrik</p>	<p>Pembangunan jalan inspeksi tepi sungai dengan lebar 1,5m di sisi barat dan timur sungai</p> <p>Pembangunan drainase di sepanjang jalan inspeksi barat dan timur sungai</p> <p>Pembangunan di sisi timur dan barat sungai</p> <p>a. Penanaman pohon palem raja tinggi 4m dijalur pedestarian sisi barat dan timur sungai</p> <p>b. Penanaman rumput gajah/ jepang di sisi barat dan timur sungai</p>	<p>Pada segmen 3 belum dilakukan pembangunan karena belum adanya dana</p>

	<p>f. Bak sampah</p> <p>Bangunan</p>	<p>Pemasangan lampu pedestrian dan lampu taman di sisi barat dan timur sungai</p> <p>Bahan bsel galvanis dan tempat sampah viber glass</p> <p>a. Pembuatan pergola sisi barat dan timur sungai</p> <p>b. Pembuatan septiktank komunal limbah domestik di sisi timur</p> <p>c. Pemasangan pipa induk sal limbah komunal dengan buis beton d: 30 di pemukiman sisi timur (RT 24, 22, 21)</p>	
4	<p>Lingkungan</p> <p>a. Revitalisasi sungai</p> <p>b. Jalan</p> <p>c. Drainase</p> <p>d. Vegetasi</p> <p>e. Listrik</p> <p>f. Bak sampah</p> <p>Bangunan</p>	<p>Perbaikan tebing sungai/ membuat tanggul</p> <p>Pembangunan jalan inspeksi tepi sungai dengan lebar 1,5m di sisi barat dan timur sungai</p> <p>Pembuatan drainase sepanjang jalan inspeksi sisi barat dan timur sungai</p> <p>a. Penanaman pohon palem raja tinggi 4m di jalur pedestrian di sisi barat dan timur sungai</p> <p>b. Penanaman rumput gajah/ jepang di sisi barat dan timur sungai</p> <p>Pemasangan lampu pedestrian dan lampu taman barat dan timur sungai</p> <p>Tempat sampah viber glass sisi barat dan timur sungai</p> <p>a. Pembuatan pergola sisi barat dan timur sungai</p>	<p>Masyarakat mengerjakan sendiri pembangunan dimulai dari pembersihan kawasan sungai, pembuatan talud, dan pembangunan tebing sungai yang dibantu beberapa tukang bangunan. Masing-masing rumah warga yang berada di pinggir sungai Buntung menjadikan 1,5m tanah mereka sebagai jalan inspeksi. Masyarakat Karangwaru melakukan pengukuran dan pembangunan jalan inspeksi.</p> <p>Dari program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan ada beberapa program dan kegiatan yang belum terlaksanakan karena dana yang belum mencukupi, diantaranya: program</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pembuatan septiktank komunal limbah domestik c. Pemasangan pipa induk sal limbah komunal dengan duit beton d: 30 di pemukiman sisi barat dan timur sungai d. Pembuatan gazebo 	vegetasi, listrik, kegiatan pembuatan septiktank komunal limbah domestik, pemasangan pipa induk sal limbah, dan pembuatan gazebo.
5	<p>Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vegetasi b. Listrik c. Bak sampah <p>Bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman pohon palem raja tinggi 4m di jalur pedestrian di area bermain anak dan area panggung terbuka b. Penanaman rumput gajah/ jepang di area panggung terbuka dan area bermain anak c. Penanaman cemara udang tinggi 1-1,5 m <p>Pemasangan lampu pedestrian dan lampu taman</p> <p>Tempat sampah viber glass</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan gardu pandang b. Panggung terbuka c. Mini dermaga/ anjungan d. Mini resto e. Pembuatan gazebo f. Tempat usaha warga 	Pada segmen 5 belum dilakukan pembangunan karena belum adanya dana
6	<p>Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vegetasi b. Listrik c. Bak sampah 	<p>Penanaman pohon palem raja tinggi 4m di jalur pedestrian, penanaman rumput gajah, penanaman pohon dadap merah</p> <p>Pemasangan lampu pedestrian dan lampu</p>	Pada segmen 6 belum dilakukan pembangunan karena belum adanya dana

	Bangunan	taman Tempat sampah viber glass a. Tempat duduk/ sitting group b. Pembuatan gazebo dan tempat usaha warga	
--	----------	--	--

Tabel 1.5- program, kegiatan, capaian PLPBK. (Sumber: dokumen PLPBK Kelurahan Karangwaru dan observasi yang telah dilakukan penulis)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembangunan secara keseluruhan baru dilaksanakan pada segmen 1 melalui dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), dari semua program dan kegiatan yang direncanakan sudah terrealisasi, sedangkan pembangunan yang lain yang sudah dilakukan ialah pada segmen 4, namun pada pembangunan segmen 4 masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum terrealisasi karena kendala dana, seperti yang disebutkan oleh sekretaris BKM.

“Segmen 4 belum selesai secara keseluruhan, soalnya dana kemitraan terbatas jadi tidak bisa mengcoverkebutuhan di segmen 4. Jadi pembangunan dilakukan dengan dana yang ada dulu, nanti kalau ada dana lagi bisa dilanjutkan pembangunannya.” (wawancara pada 4 Nov 2014)

Sedangkan pada segmen 2,3,5 dan 6 belum dilaksanakan pembangunan karena belum adanya dana.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK)

Dalam Edi Suharto: 2005 menyebutkan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: pertama menciptakan suasana atau iklim yang

.....memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan tempat mereka tinggal menjadi hal pertama yang dilakukan dalam sosialisasi program PLPBK, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kondisi lingkungan dan kemudian masyarakat akan memahami dan mengembangkan potensi apa yang ada dilingkungan mereka.

“Yang kami lakukan dalam program ini ialah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan, apa dan bagaimana yang dapat mereka lakukan, di Karangwaru ini banyak potensi jadi semua warga harus memahami.” (wawancara dengan Lurah Karangwaru Bapak Suhardi, SIP pada 14 Nov 2014)

BKM Tridaya Waru Mandiri bersama pihak Kelurahan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana potensi di Kelurahan Karangwaru terutama di segmen 1-6 yang menjadi objek program PLPBK, kondisi sosial ekonomi seperti apa yang terjadi dan bagaimana memaksimalkan kondisi tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, program PLPBK memberi ruang

kepada masyarakat untuk mengembangkan kawasan tinggalnya baik dari segi

kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dari segi kesehatan, kini kehidupan masyarakat Karangwaru tidak lagi dihantui oleh tingginya tingkat DBD dan lokasi tinggal mereka kini lebih nyaman. Dari segi sosial, kini warga Karangwaru memiliki kawasan untuk bersosialisasi dengan adanya pembangunan di segmen 1 yang menjadi lokasi memancing maupun sekedar menghabiskan waktu luang. Dari segi ekonomi, kini beberapa warga membuka warung didepan rumah mereka dan ketika diadakan event disekitar Karangwaru Riverside banyak warga yang memanfaatkannya untuk berjualan.

“Masyarakat kini sadar pentingnya PHBS dalam kehidupan sehari-hari mereka, kebiasaan membuang limbah kesungai tidak dilakukan lagi oleh warga setelah implementasi program PLPBK”. (wawancara dengan Lurah Karangwaru Bapak Suhardi, SIP pada 14 Nov 2014)

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam hal ini pemerintah Kelurahan Karangwaru bersama BKM Tridaya Waru Mandiri terus berupaya untuk meingkatkan pemberdayaan masyarakat dan menjaga kestabilan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat terus bisa berkembang.

Moeljarto (1995:68) menyebutkan tentang ciri-ciri dalam model pemberdayaan, yang kemudia penulis melakukan analisis dengan data yang telah diperoleh.

- a. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus diletakkan pada masyarakat sendiri. Masyarakat Karangwaru yang menjadi lokasi implementasi program PLPBK melakukan perencanaan

sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kelurahan mereka, pemberdayaan yang dilakukan pada program ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Karangwaru dilakukan dalam 2 bentuk, yakni dalam bentuk fisik dan dalam bentuk non fisik. Dalam bentuk fisik ialah, masyarakat Karangwaru turut serta dalam pembangunan fisik segmen 1, mulai dari pembersihan lingkungan, pembangunan jembatan penghubung di segmen 1, pembangunan lokasi bermain, pembangunan jalan inspeksi, juga pembangunan bantaran sungai. Sedangkan untuk pemberdayaan non fisik terlihat pada tahap persiapan, perencanaan, dan pemasaran, seperti antusias warga yang ikut dalam proses sosialisasi, membentuk KSM-KSM sebagai wadah bagi warga, warga juga turut serta dalam perencanaan program dan juga pemasaran program.

- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang ada untuk mencapai kebutuhannya. Dari observasi yang telah dilakukan penulis, masyarakat Karangwaru terutama disekita kawasan segmen 1 sudah dapat mengelola potensi-potensi yang ada dikawasan mereka, seperti peningkatan pendapatan mereka dengan membuka warung di depan rumah mereka yang kini menghadap ke sungai dan mengadakan event kuliner dan lomba untuk anak-anak yang bekerja sama dengan Kelurahan dan pihak terkait. Ini merupakan sebuah kemajuan bagi warga bantaran sungai dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dari segi kesehatan, sosial, pendidikan,

- c. Mentoleransi variasi lokal sehingga sifatnya amat fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Sebagai masyarakat yang berada dikawasan perkotaan dengan berbagai background sosial yang cenderung kurang bersosialisasi dengan sesama warga, BKM Tridaya Waru Mandiri terus mengupayakan masarakat untuk dapat bekerjasama dalam membangun kawasan tinggal mereka. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai bisa menyesuaikan diri dengan kondisi mereka dengan memperhatikan berbagai aspek penunjang kehidupan mereka terutama tingkat kesadaran mereka tentang lingkungan.
- d. Menekankan pada proses sosial learning. Dalam program PLPBK proses sosial leraning pada pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam bekerjasama membangun lingkungan mereka, program dan kegiatan PLPBK menekankan pada pembelajaran sosial dimana masyarakat dapat menganalisis permasalahan sosial mereka, bagaimana lingkungan sosial mereka, kebutuhan apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan sosial mereka.
- e. Proses pembentukan jaringan antara birokrasi dan LSM, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri. Di Kelurahan Karangwaru masyarakat memiliki wadah dalam menyampaikan aspirasi mereka yaitu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan organisasi diatasnya ialah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang menjadi penggerak dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan program PLPBK yang dilakukan di

Kelurahan Karangwaru melihat dari proses perencanaan hingga proses pembangunan

juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan didampingi oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) maka penulis menggunakan pendekatan bottom up dengan model implementasi menurut Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern & David O'Poter.

1. Jaringan Aktor Yang Terlibat

Menurut Thomas R Dye (2012:39) dalam Adipurnawidagdo hal. 5, menyebutkan bahwa dalam sebuah kebijakan publik terdapat 3 sub sistem yang saling berinteraksi dalam satu kesatuan tindakan. Salah satunya sub sistem *stakeholder* (pelaku kebijakan) berinteraksi dengan lingkungan kebijakan (*policy enviroment*) dan dengan kebijakan publik (*public policy*). Interaksi berlangsung secara timbal balik dalam pengertian pada stakeholder yang berperan terhadap lingkungannya dan sebaliknya lingkungan memiliki peran terhadap para pelaku kebijakan.

Dalam implementasi program PLPBK di Kelurahan Karangwaru, pelaksana program yang terlibat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu dalam dan luar pemerintahan. Didalam pemerintahan terdapat pemerintah Kelurahan Karangwaru beserta jajarannya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pokja-pokja PLPBK, Tim Teknis Pemkot untuk PLPBK, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran) dan didukung oleh PIOK Kecamatan TKPKD dan TKPP

Sedangkan dari luar pemerintah yaitu kelompok masyarakat yang terlibat langsung dan mendukung pelaksanaan program PLPBK diantaranya, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang struktur organisasinya diisi oleh masyarakat dan masyarakat Karangwaru yang menjadi implementor hingga pengawas keberlangsungan program.

Aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi program PLPBK Kelurahan Karangwaru:

- a. Masyarakat Karangwaru, merupakan pelaku utama dalam implementasi program PLPBK. Masyarakat Karangwaru terlibat langsung dalam implementasi dimulai dari persiapan, perencanaan, pemasaran program, pelaksanaan, pengawasan hingga pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat.
- b. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Tridaya Waru Mandiri, merupakan lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan program. BKM menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam program PLPBK, BKM mendampingi masyarakat dari proses persiapan hingga pemeliharaan.
- c. Kepala Desa Kelurahan Karangwaru Bp. Suhardi, S.IP, merupakan tokoh yang berperan sebagai pembina dan juga berperan dalam memberikan penjelasan dan panduan kepada masyarakat untuk mengimplementasikan program PLPBK. Kepala Desa memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PLPBK di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai

dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui kegiatan PLPBK dapat tercapai dengan baik.

- d. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang diketuai oleh Bp. Sugiyanto Saputro, BA. TIPP adalah tim yang terdiri dari pelaku tingkat kelurahan/desa antara lain, anggota BKM, perangkat kelurahan/desa, kelompok peduli tingkat kelurahan/desa. TIPP dibentuk dan ditetapkan melalui SK bersama antara BKM dan Lurah/Kepala Desa. TIPP bertanggungjawab kepada BKM dan kepala kelurahan/desa. TIPP pada dasarnya merupakan media atau wadah pembelajaran bagi pemerintah kelurahan beserta stafnya, BKM dan kelompok peduli setempat mengenai penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLP-BK) serta sarana komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah kelurahan dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan PLPBK. Oleh karena itu, keberadaan TIPP adalah selama pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan/Desa tersebut, yang akan dievaluasi pada setiap akhir tahun pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- e. TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran) Bp. Ikhsan, adalah tenaga ahli individual mendampingi satu kelurahan lokasi-PLPBK dalam satu Kabupaten/Kota yang direkrut oleh BKM Tridaya Waru Mandiri. Peran TAPP tidak menggantikan pengambil keputusan tetapi memfasilitasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. TAPP bertanggungjawab secara

- f. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), adalah nama jenerik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PLPBK. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan/desa yang memiliki ikatan kebersamaan (common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM adalah pelaksana kegiatan sekaligus pemanfaat hasil kegiatan terkait dengan kegiatan/investasi PLPBK yang didanai dari berbagai sumber. Secara umum tugas pokok KSM sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam hal pekerjaan konstruksi cukup besar dan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu KSM, maka dapat dimungkinkan kerjasama beberapa KSM untuk mengelola pelaksanaan konstruks. KSM yang ada di kelurahan Karangwaru diantaranya KSM Waru Kasih 1 dengan ketua Bp. Faris Said, KSM Waru Kasih 2 Bp. Ir. Danatoro dan Waru Kasih 3 Bp. Edi Pramono.
- g. PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Kecamatan. PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati untuk bertindak sebagai wakil pemerintah dalam menanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara pemerintah dan masyarakat, pengendalian kegiatan di tingkat kelurahan/desa.

Aktor yang terlibat pada tahap persiapan ialah masyarakat Karangwaru sebagai subjek implementasi program PLPBK, BKM Tridaya Waru Mandiri sebagai koordinator dan fasilitator program PLPBK dan Kepala Desa Kelurahan

Karangwaru sebagai pembina dan pemandu dalam pengimplementasian program PLPBK. Pada tahap perencanaan melibatkan masyarakat Karangwaru, BKM Tridaya Waru Mandiri, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) sebagai koordinator pada tahap perencanaan, dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Pada tahap pemasaran kawasan prioritas melibatkan masyarakat Karangwaru, BKM Tridaya Waru Mandiri, KSM, PJOK Kecamatan, Tim Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran (TAPP) sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam mengambil keputusan dan pemasaran. Pada tahap terakhir yaitu tahap pembangunan aktor yang terlibat ialah semua aktor yang ada di jaringan aktor program PLPBK, namun dalam implementasi secara langsung lebih banyak dilakukan oleh masyarakat Karangwaru, KSM, dan BKM Tridaya Waru Mandiri.

2. Kebijakan Publik Yang Mendorong Masyarakat Untuk Mengerjakan Sendiri Atau Masih Melibatkan Pemerintah Daerah.

Secara teknis pelaksanaan program PLPBK melibatkan masyarakat secara keseluruhan, masyarakat menjadi perencana, pelaksana, pengawas sekaligus pemelihara. Dari tujuan PLPBK yang secara garis besar ingin menjadikan masyarakat madani mandiri dan sadar akan lingkungan tinggalnya menempatkan masyarakat sebagai subjek implementasi.

“Masyarakat sendiri yang merencanakan seperti apa pembangunan yang akan dilakukan, apa saja yang harus dilakukan, kami hanya mendampingi dan

memberikan arahan” (wawancara 3 Nov 2013 dengan ketua BKM Tridaya Waru Mandiri Bapak Sugito, B.Sc)

Pada proses perencanaannya masyarakat diwakili oleh KSM-KSM yang ada dimasyarakat yang menjadi wakil/ representasi dari warga Karangwaru untuk menyampaikan keinginan mereka dan merumuskan menjadi sebuah perencanaan partisipatif.

“Kalo semua warga terlibat dalam perencanaan kan tidak bisa kondusif jadi diwakilkan oleh KSM-KSM yang ada. KSM kan warga Karangwaru juga jadi warga sudah percaya dengan KSM bahwa aspirasi mereka pasti disampaikan.” (wawancara 14 Nov 2013 dengan Bapak Suhardi, S.IP)

Program PLPBK ini sendiri melibatkan masyarakat untuk melaksanakan program secara langsung dan masih melibatkan pemerintah daerah namun hanya dalam tingkat Kelurahan.

3. Kebijakan Sesuai Harapan, Keinginan Publik Menjadi Target.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, kebijakan pada program PLBPK menyebutkan bahwa masyarakat berperan penting dalam implementasi program. Dari semua proses implementasi yang melibatkan masyarakat dan didampingi oleh BKM Tridaya Waru Mandiri dapat disimpulkan bahwa program PLPBK sesuai dengan harapan masyarakat Karangwaru yang menjadi lokasi

pengimplementasian program. Seperti yang di sampaikan Lurah Karangwaru Bapak

“Warga di pinggiran sungai merelakan tanahnya sepanjang 1,5m untuk dijadikan jalan inspeksi/ jalur pedestarian dan warga juga setuju untuk menjadikan sungai sebagai halaman depan rumah mereka”. (wawancara pada 14 Nov 2014)

Keseriusan warga Karangwaru terutama warga yang tinggal dikawasan pinggiran sungai dapat dilihat dari kerelaan atas tanah mereka yang dijadikan jalur pejalan kaki sehingga memudahkan akses masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain. Seperti yang disampaikan salah satu warga dibantaran sungai.

“Kalau masalah tanah dijadikan jalan kami (warga di bantaran sungai) sudah sepakat, kan rumah sekarang menghadap sungai jadi perlu jalan didepan supaya tidak langsung berbatasan dengan sungai”. (wawancara dengan ibu Sumini pada 4 Nov 2014).

Hasil fisik yang sudah selesai dilakukan di Kelurahan Karangwaru, dapat dilihat pada pembangunan di segmen 1 telah diselesaikan dengan dana BLM dan segmen 4 dari dana kemitraan Ditjen Cipta Karya. Pembangunan di segmen 1 juga merupakan hasil dari rebug warga dengan TIPP yang menghasilkan kawasan prioritas. Dari pembangunan pada segmen 1 dan 4 yang menjadi hilir dari sungai Buntung di Kelurahan Karangwaru warga berharap tidak lagi terjadi laupan air sungai yang menyebabkan banjir serta menurunkan DBD di Kelurahan Karangwaru.

4. Prakarsa Masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam semua program yang dicanangkan oleh PNPM sangat diutamakan partisipasi masyarakat, seperti halnya program PLPBK di Kelurahan Karangwaru

partisipansi masyarakat cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang

sudah dilaksanakan, masyarakat secara langsung melakukan implementasi program bersama dengan BKM Tridaya Waru Mandiri bersama organisasi dan kelompok terkait lainnya. Sosialisasi dan perencanaan selesai dilakukan pada tahun 2010, setelah itu pada tahun 2011 dilakukan pembangunan. Pembangunan dilakukan langsung oleh masyarakat Karangwaru, seperti yang disampaikan Bapak Sugito, B.Sc.

“Setiap hari Minggu warga melakukan kerja bakti di Sungai Buntung yang menjadi kawasan pembangunan pertama program PLPBK ini, mulai dari membersihkan sungai hingga membuat jalur inspeksi.” (wawancara 3 Nov 2014)

Warga lebih mudah dalam proses pembangunannya karena mereka sudah mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan sesuai hasil perencanaan partisipatif yang sudah direncanakan. Peran BKM Tridaya Waru Mandiri selain sebagai pendamping/fasilitator juga sebagai pemegang dana BLM supaya akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Pada proses pembangunannya kami hanya sebagai fasilitator. Apa yang warga butuhkan kami menyediakan, kurang ini kurang itu ya kami yang mencarikan.” (wawancara dengan Sekertaris BKM, Ibu Eni Pratiwi, SH pada 4 Nov 2014)

Prakarsa dilakukan oleh BKM Tridaya Waru Mandiri sebagai penanggungjawab keseluruhan dan penerak dalam semua program dan kegiatan PI PRK

B. Kendala-Kendala dalam Implementasi PLPBK

Kendala-kendala yang ada dalam implementasi program PLPBK tidak begitu mengganggu proses implementasi, seperti yang diungkapkan Lurah Karangwaru dan Ketua BKM Tridaya Waru Mandiri, kendala yang ada antara lain:

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat pada awal pengimplementasian program. Warga yang terbiasa tinggal dengan keadaan lingkungan sebelumnya sulit untuk diberikan pemahaman tentang penataan lingkungan tapi seiring dengan proses pembangunan warga bisa lebih memahami lingkungan tinggalnya.
2. Rendahnya partisipasi pembangunan warga yang tinggal jauh dari lokasi pembangunan. Warga yang tinggal jauh dari lokasi pembangunan tidak ikut serta karena menganggap bahwa mereka jauh walaupun masih berada dalam satu Kelurahan.
3. Keterbatasan dana pembangunan. Dana yang didapat dari BLM sebesar 1M hanya cukup untuk melakukan pembangunan di segmen 1.
4. Sampah yang masih ada di aliran Sungai Buntung, hal ini bukan disebabkan oleh warga Karangwaru yang membuang sampah disungai namun Sungai Buntung yang memiliki hulu di wilayah Kabupaten Sleman menjadikan kendala tersendiri bagi pemeliharaan lingkungan warga Karangwaru.